

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

DPRD DKI Dukung Anggaran Penanganan Kemiskinan dan Stunting Rp 13,36 Miliar Ditambah Hingga Akhir Tahun

WARTA KOTA, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahas Perubahan APBD tahun anggaran 2023 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pada kesempatan itu disepakati penambahan anggaran Rp 28 miliar. Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, anggaran tersebut merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat yang diberikan ke DKI dalam bentuk dana transfer yang telah diatur alokasinya dengan rincian, peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 13,36 miliar dan penambahan alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp 15,059 miliar.

"Dengan alokasi tersebut maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menentukan langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono sebelum diberikan persetujuan mengusulkan agar dana transfer Pemerintah Pusat dengan alokasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dapat dirinci lagi untuk melancarkan dua kegiatan, yakni penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta sebesar Rp 5,96 miliar dan penurunan angka stunting di

Jakarta sebesar Rp 7,36 miliar.

"Jadi, penambahan pagu ini bukan kita yang harus mencari dananya, tapi insentif dari pemerintah pusat yang tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas Joko.

Menurutnya, dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemrov DKI karena Jakarta dinilai berhasil dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Makanya insentif itu diberikan kepada kita, karena dinilai berhasil," tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan anggaran harus tepat sasaran

Menyikapi penambahan anggaran tersebut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI sekaligus Sekretaris Komisi B WA Ode Herlina menyatakan akan terus mendorong Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi

untuk menambah alokasi dan jenis pelatihan untuk menambah kesempatan kerja masyarakat tuna karya, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian mereka.

"Harapan saya supaya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang difasilitasi Pemprov DKI Jakarta itu bisa lebih diperbanyak kuantitas dan berorientasi pengisian pekerja di BUMD. Pelatihannya harus menjurus ke kebutuhan di BUMD," ujarnya.

Hal senada juga diungkap anggota Banggar Yuke Yurike.

Menurutnya, pengasahan kemampuan khusus memang dibutuhkan masyarakat menengah kebawah, sehingga bisa digunakan mencari pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup.

Program itu diyakini efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

"Mengenai pengentasan kemiskinan, kami berharap pengasahan skill (kemampuan) bisa berjalan, jadi tidak hanya sekedar Bansos atau BLT saja tapi lebih ke program-program lain," ucapnya.

Sementara anggota Banggar Israyani menyatakan, siap mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap besaran subsidi perorangan pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang saat ini hanya senilai

Rp 10.000 per porsi, dengan harapan dapat menekan angka gizi buruk di Jakarta.

"Kami dari Komisi A kemarin merekomendasikan agar bagaimana angka yang Rp 10.000 untuk PMT dari tahun lalu menjadi perhatian.

"Jadi kalau tetap angka Rp 10.000 per orang ini bisa untuk dikasih makan apa adik-adik kita, anak-anak kita karena nanti pasti ada hubungannya dengan peningkatan gizinya," ungkapnya.

Komitmen Pemprov DKI Tekan Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem dengan berbagai upaya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada lonjakan angka kemiskinan di Jakarta terjadi pasca pandemi Covid-19.

Namun pada Maret 2023 lalu, BPS menulis terjadinya penurunan kemiskinan sebesar 4,44 persen atau turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen.

Adapun jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.

"Ini merupakan preseden yang baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan,"

kinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi dalam keterangannya.

Dwi menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebanyak 17.100 orang dibandingkan September 2022.

Bila dibandingkan dengan awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3.030 orang.

Namun begitu, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan terus melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bentuk komitmen, Heru telah menetapkan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, ia ingin jajarannya ada upaya bekerja sama agar percepatan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik.

Heru menambahkan, jajarannya juga telah memperbaiki data terpadu mengenai kemiskinan ekstrem agar lebih akurat.

Dengan begitu, strategi yang disiapkan bisa berjalan maksimal.

"Eksesktif telah melakukan upaya perbaikan data terpadu berbasis

sistem informasi dan strategi utama Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," kata Heru.

Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, juga berkomitmen menyelesaikan permasalahan stunting di Ibu Kota.

"Pemprov DKI Jakarta terus mencari anak-anak yang terkena stunting. Kita akan segera menyelesaikannya," kata Heru.

Menurutnya, dari total stunting di seluruh wilayah Jakarta yang berjumlah lebih 22 ribuan kasus, sekitar 9.000 kasus di antaranya sudah dituntaskan.

"Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23.000 kasus dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13.000 kasus," ungkap Heru.

Terkait penanganan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Heru terus bersinergi melalui program Jakarta Beraksi.

Pemrov DKI berkoordinasi dengan pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting di Jakarta.

"Kami juga telah memfasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagai dashboard stunting," ujarnya.

"Selain itu, dilakukan pula penguatan fungsi posyandu sebagai tempat skrining awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta PMT melalui puskesmas dan kelurahan kepada ibu hamil dan balita," tandas Heru. (*/dip)



Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin rapat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri